



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

PENINGKATAN AKURASI DATA KEPENDUDUKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN INTEGRASI SISTEM DENGAN MEMANFAATKAN SENSUS PENDUDUK TAHUN 2020

NAMA : ERIKSON P. MANIHURUK, S.Kom, M.Si
N I P : 19720510 199203 1 001
N D H : 16

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2019**

EXECUTIVE SUMMARY

Semangat pemerintah dalam lima tahun belakangan ini berubah. Salah satunya dilakukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan membenahi pelayanan publik. Perubahan itu dimulai dengan mengganti seluruh pola-pola masa lalu dengan pola zaman sekarang. Bisa juga berarti mengganti pola manual dengan kerja-kerja digital. Lebih dari itu Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedang membangun reputasi dan branding baru bagi Indonesia melalui pelayanan publik berbasis pemanfaatan data kependudukan. Indonesia memiliki dua sumber data besar, tetapi kemudian beralih paradigmanya dari BPS ke Kementerian Dalam Negeri untuk database kependudukan. BPS adalah data proyeksi, yaitu data yang diukur berbasiskan teknis dan metode penelitian. Sedangkan data Kementerian Dalam Negeri adalah data registrasi lengkap yang terdiri dari *by name by address*.

Pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan sensus penduduk, timbul gagasan besar bagaimana data registrasi kependudukan yang dimiliki Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri digunakan sebagai basis data sensus, agar pelaksanaan sensus 2020 lebih muda dan murah serta dapat meningkatkan akurasi data kependudukan dan integrasi sistem Kementerian Dalam Negeri dengan memanfaatkan sensus penduduk tahun 2020 dalam mewujudkan satu data kependudukan Indonesia merupakan langkah besar dalam dunia kependudukan. Langkah ini merupakan kunci dalam menghilangkan dualisme sumber data kependudukan yang telah berlangsung lama.